



PPDB, AJARI ANAK BERJIWA KSATRIA

Kuota Dalam Kota Jadi Incaran

YOGYA (KR) - Setiap kali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogya digelar, permohonan mutasi kependudukan cenderung ada penambahan. Meski peningkatan tersebut tidak signifikan, namun tidak bisa dipungkiri jika kuota siswa dalam kota selalu menjadi incaran siswa dari luar daerah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya, Sisruadi tidak menampik hal tersebut. "Kalau beberapa tahun lalu, saat ada PPDB ada lonjakan mutasi ke sini. Tapi sekitar empat tahun belakangan sudah tidak terlalu tinggi. Bisa jadi, mutasinya sudah jauh hari sebelum PPDB," ungkapnya didampingi Kepala Seksi Penerbitan Kartu Keluarga, Bram Prasetyo serta Kepala Bidang Data dan Informasi, Deddy Feriza, Selasa (14/6).

Pada hari biasa, imbuhnya, mutasi warga yang datang ke Yogya paling tinggi mencapai 35 orang perhari. Namun dalam hari-hari terakhir saat mulai proses PPDB naik menjadi sekitar 40 orang perhari. Beberapa yang pindah tersebut mencantumkan tujuan untuk kepentingan pendidikan atau sekolah.

Sisruadi mengaku, pihaknya tidak bisa menolak kepindahan kependudukan sepanjang persyaratannya lengkap. Terutama surat pengantar pindah dari daerah asal. Surat pindah tersebut sudah dicantumkan tujuan mutasi apakah karena keluarga, bekerja, pendidikan atau lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya, Edy Heri Suasana menuturkan, penentuan kuota kursi PPDB sebenarnya untuk memberikan rasa keadilan. Baik bagi warga kurang mampu, penduduk asli kota maupun warga luar kota. Hanya, penduduk kota selalu mendapat kuota paling banyak karena anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemkot dapat dirasakan oleh penduduknya. "Untuk menjaganya, sejak tahun kemarin kami sudah menerapkan kebijakan Kartu Keluarga (KK) yang statusnya anak atau cucu saja yang berhak masuk kuota dalam kota," tandasnya.

Kendati demikian, harus diakui adanya fakta anak atau siswa kota yang diasuh oleh Pakde atau Bude sehingga dalam KK tertulis sebagai famili lain. Hal ini yang kerap dimanfaatkan oleh penduduk luar kota agar bisa masuk kuota dalam kota. Tapi Dinas Pendidikan juga berupaya memberikan syarat baru bagi KK dengan famili lain, yakni surat keterangan domisili dari RT dan RW setempat.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Fauzi Noor Afshochi mendukung langkah Dinas Pendidikan guna mengamankan kuota dalam kota. Namun tetap saja celah tersebut tidak bisa dibendung. Kondisi demikian justru mencerminkan pola pendidikan orangtua yang kurang tepat. "PPDB justru harus menjadi media pembelajaran bagi anak agar berani bersikap ksatria. Jangan kok karena takut bersaing kemudian memasukkan sebagai warga kota," katanya. (Dhi)-c

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005